

## PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN

Yulinda Devi Pramita<sup>1</sup> dan Siti Noor Khikmah

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Magelang  
email: devi.feummgl@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Magelang  
email: noorkhikmah@yahoo.com

### *Abstract*

*This study was done to measure factors influencing the financial report transparency implementation of SKPD. External pressure, accountability, society participation and management commitment are factors included in this study. The main problem of this study is that those factors influence the financial report transparency implementation of SKPD in Magelang. The sample of this study was taken through the use of purposive sampling method which was 87 respondents from all of SKPD in Magelang. The result of the study represents that the financial report transparency implementation is influenced by some factors as the base of institutional theory. Factors influencing the financial report transparency implementation are external pressure, accountability, society participation, and management commitment.*

**Keywords:** *External Pressure, Accountability, Society Participation, Management Commitment, Financial Report Transparency*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang Masalah

Salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Hal tersebut menimbulkan berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat memburuk dan pada akhirnya berdampak pada krisis ekonomi dan krisis kepercayaan (Werimon, dkk. 2007). Masalah tersebut membawa tata cara penyelenggaraan dan perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia membudayakan transparansi di daerahnya dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur khusus mengenai transparansi. Di Indonesia, terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai transparansi pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat (radarbanten.com) selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah ini masih sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana. Kabupaten/kota yang memiliki perda transparansi pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Solok, Kabupaten Magelang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta.

Akan tetapi, ironisnya kebanyakan perda terkait transparansi pelaporan keuangan yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakannya. Butuh komitmen yang tinggi oleh segenap anggota instansi pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan. Tekanan institusional cenderung berkembang dimana pengukuran dan kontrol yang lemah atau tidak tepat, dan akuntabilitas rendah (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004). Rendahnya akuntabilitas menggambarkan rendahnya keinginan organisasi publik untuk menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan di sektor publik, khususnya

organisasi pemerintah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi homogenitas penerapan kebijakan transparansi pelaporan keuangan yang dilihat dari sudut pandang teori institusional dan teori isomorfisme. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD yaitu variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Perbedaan kedua adalah responden penelitian ini adalah anggota organisasi publik SKPD di Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan responden atau sampel penelitian SKPD Kota Magelang karena di Kota Magelang belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang transparansi pelaporan keuangan sehingga belum ada kewajiban berdasarkan perda terkait transparansi pelaporan keuangan. Hal tersebut memberikan implikasi positif terhadap penelitian ini dengan tidak adanya kewajiban untuk mengungkapkan transparansi pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD dipengaruhi beberapa faktor yang mendasarkan pada teori institusional. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan menurut hasil penelitian ini adalah tekanan eksternal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan komitmen manajemen.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD di Kota Magelang?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD di Kota Magelang?
- 3) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD di Kota Magelang?
- 4) Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD di Kota Magelang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menguji pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD di Kota Magelang?
- 2) Mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD di Kota Magelang?
- 3) Mengetahui dan menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD di Kota Magelang?
- 4) Mengetahui dan menguji pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD di Kota Magelang?

### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik terutama pengembangan sistem transparansi pelaporan keuangan SKPD dan manajemen sektor publik.

## **2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA ADA)**

### **2.1. Teori Institusional**

Teori institusional (*Institutional Theory*) didasarkan pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung (Meyer dan Rowan, 1977). Scott (2008) dalam Villadsen (2011) menjelaskan teori institusional digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori institusional berpengaruh pada tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen (Dacin, 1997; Dacin *et al.*, 2002), faktor eksternal (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004) faktor sosial (Scott, 2004), faktor ekspektasi masyarakat (Ashworth *et al.*, 2009), faktor lingkungan (Jun dan Weare, 2010). Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau

harapan sosial (DiMaggio dan Powell 1983; Frumkin dan Galaskiewicz, 2004; Ashworth *et al.*, 2009) dimana organisasi berada.

## 2.2. Transparansi pelaporan keuangan

Hood (2007) menyatakan bahwa transparansi sebagai sebuah konsep mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang input, output, dan *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara input, output, dan *outcome*), transparansi *real-time* (informasi yang dirilis segera), atau transparansi retrospektif (informasi tersedia berlaku surut). Rawlins (2006) memberikan tambahan pada definisi yang diberikan oleh Heise (1985) dalam Rawlins (2008). Definisi transparansi secara operasional adalah sebagai berikut transparansi adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua informasi yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya. Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan dan memberikan suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Transparansi dalam praktiknya juga membutuhkan kepercayaan (Rawlins, 2008). Organisasi yang mengedepankan adanya transparansi publik akan menjadi rentan akan kritik dari para pemangku kepentingan, karena para pemangku kepentingan dapat melihat potret mengenai gambaran organisasi secara terbuka. Organisasi publik akan menghadapi risiko transparansi, dimana organisasi tidak dapat memastikan apa yang menjadi harapan pemangku kepentingan dan bagaimana pemangku kepentingan akan menggunakan informasi yang disampaikan oleh organisasi publik.

## 2.3. Tekanan Eksternal

Berdasarkan teori institusional terdapat isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi yang merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya (DiMaggio dan Powell, 1983). Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Ashworth, 2009). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Kekuatan koersif dari suatu peraturan juga dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperbaiki atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*) (Scott, 1987), sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif (Hess, 2007) agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi. Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik daripada teknis (Ashworth, 2009). Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, khususnya terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

H1: Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.

## 2.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengertian akuntabilitas dapat dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja. Akuntabilitas pelaporan

keuangan sektor publik berimplikasi pada transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh akuntabilitas.

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan

## 2.5. Partisipasi Masyarakat

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan berupa keterlibatan dan pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun, serta dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan (Hopwood, 1994 dalam Zainuddin *et al.*, 2002 dalam Rosseptalia, 2006). Partisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut juga meningkatkan kinerja, sikap dan kepuasan kerja terhadap anggaran. Partisipasi masyarakat mendorong organisasi sektor publik untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang transparan. Konsekuensi dari teori keagenan masyarakat dan SKPD menuntut organisasi sektor publik untuk dapat menerapkan pelaporan keuangan yang transparan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan

## 2.6. Komitmen Manajemen

Dalam teori institusional yang berdasarkan isomorfisme, isomorfisme mengedepankan pada profesionalisme. Institusionalisasi sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Selznick, 1992 dalam Dacin, 2002). Transparansi merupakan salah satu nilai atau prinsip yang harus dipegang oleh organisasi dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh komitmen manajemen.

H4: Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Metoda pengambilan sampel

Metoda pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Hartono, 2013) yaitu anggota organisasi di semua SKPD Kota Magelang yang terlibat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan pelaporan keuangan.

### 3.2. Data penelitian

Jenis data penelitian adalah data primer berupa kuesioner penelitian. Metoda pengumpulan data dilakukan melalui survei. Kuesioner-kuesioner dari responden diseleksi terlebih dahulu agar mendapatkan kuesioner yang terisi secara lengkap.

### 3.3. Definisi operasional

#### 3.3.1 Tekanan eksternal.

Tekanan eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi) dan eksekutif. Frumkin dan Galaskiewicz (2004) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerepan suatu kebijakan maupun prosedur. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan

#### 3.3.2 Komitmen manajemen

Komitmen manajemen dalam hal ini terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada sekedar inisiatif kepatuhan atas hukum maupun peraturan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Manajemen seharusnya mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam jangka panjang. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui tindakan dan perilaku yang tepat. Selain itu, manajemen secara pribadi juga terlibat untuk memastikan bahwa sistem manajemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan. Sistem manajemen yang baik, dalam hal ini transparansi pelaporan keuangan dapat tercapai apabila SKPD memiliki staf yang andal dan kompeten di

bidangnya, adanya budaya etis dalam organisasi. Sistem manajemen yang baik akan berdampak pada terpenuhinya standar profesionalisme SKPD dalam menerapkan pelaporan keuangan

### 3.3.3 Transparansi pelaporan keuangan

Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut bahwa organisasi untuk menjadi lebih transparan dalam praktiknya, tidak hanya pada jumlah atau materialitas yang dilaporkan, tetapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Transparansi pelaporan keuangan terkait semua upaya SKPD yang secara sengaja melaporkan semua informasi keuangan yang mampu dilaporkan secara legal baik positif maupun negatif, akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab SKPD atas tindakan, kebijakan, dan praktik yang dilakukannya.

### 3.3.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban baik keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas menjadikan laporan keuangan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Prinsip lain yang perlu dicermati yaitu:

- a) Prinsip pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan.
- b) Prinsip prioritas. Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.
- c) Prinsip manfaat. Beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi perlu pula diperhatikan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 3.3.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran termasuk pada saat pelaporan keuangan SKPD masyarakat untuk dapat dilibatkan. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi pelaporan keuangan sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat ini mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006).

## 3.4. Metoda analisis data

### 3.4.1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif pertama yaitu gambaran secara terperinci tentang profil responden mengenai *gender*, usia, pendidikan. Statistik deskriptif kedua yaitu gambaran secara terperinci tentang tanggapan responden terhadap semua pertanyaan atau pernyataan dalam variabel kuesioner penelitian.

### 3.4.2. Uji kualitas data

#### a) Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid dan tidaknya pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Metode *pearson correlation* dikatakan valid apabila signifikansi butir pertanyaan atau pernyataan (*2-tailed*)  $\leq 0,05$  dan atau  $\leq 0,01$  (Ghozali, 2011).

#### b) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kehandalan jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal atau reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha*  $> 0,60$  (Ghozali, 2011).

## 3.5. Pengujian hipotesis

### 3.5.1. Analisis regresi linier sederhana

Persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 TE + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Transparansi pelaporan keuangan
- $\alpha$  = Konstanta
- TE = Tekanan eksternal

$$Y = \alpha + \beta_1 AK + e.....(2)$$

Keterangan:

- Y = Transparansi pelaporan keuangan
- A = Konstanta
- TE = Akuntabilitas

$$Y = \alpha + \beta_1 PM + e.....(3)$$

Keterangan:

- Y = Transparansi pelaporan keuangan
- $\alpha$  = Konstanta
- TE = Partisipasi masyarakat

$$Y = \alpha + \beta_1 KM + e.....(4)$$

Keterangan:

- Y = Transparansi pelaporan keuangan
- $\alpha$  = Konstanta
- TE = Komitmen manajemen

**3.5.2. Uji R<sup>2</sup>**

Uji R square (R<sup>2</sup>) menunjukkan prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi semakin kecil pengaruh semua variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruh variabel bebas. Uji R<sup>2</sup> akan dilakukan dengan bantuan program *SPSS IBM 20*.

**3.5.3. Uji t**

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara individu variabel moderasi penelitian ini. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ) atau  $< 0,05$ .

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Sampel Penelitian**

Data penelitian ini semula sebanyak 95 eksemplar kuesioner yang diberikan kepada anggota organisasi di semua SKPD Kota Magelang. Kuesioner yang kembali sebanyak 90 eksemplar, akan tetapi hanya 87 eksemplar yang dapat digunakan untuk penelitian karena pengisiannya lengkap. Jadi, persentase jumlah kuesioner yang dapat digunakan untuk penelitian sebesar 96%.

**4.2. Statistik Deskriptif Responden**

**4.2.1. Jenis Kelamin**

Data responden pertama yang dianalisis statistik deskriptif adalah jenis kelamin. Berdasarkan pengembalian kuesioner, maka peneliti dapat menyajikan tabel tentang hasil statistik deskriptif jenis kelamin responden yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jenis Kelamin Responden**  
**Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	68	78,2	78,2	78,2
Valid Perempuan	19	21,8	21,8	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Sumber: *Data primer, diolah 2015*

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 68 orang atau 78,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa anggota

organisasi di SKPD Kota Magelang yang berpartisipasi dalam penelitian ini didominasi laki-laki. Pimpinan yang lebih didominasi laki-laki dan keterlibatan laki-laki dalam proses di organisasi SKPD menunjukkan partisipasi laki-laki dalam transparansi pelaporan keuangan SKPD dengan mempertimbangkan variabel independen yang mempengaruhi.

#### 4.2.2. Usia

Data responden kedua yang dianalisis statistik deskriptif adalah usia. Berdasarkan pengembalian kuesioner, maka peneliti dapat menyajikan tabel tentang hasil statistik deskriptif usia responden yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Usia Responden**  
**Usia**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
≤ 30 t	6	6,9	6,9	6,9
≥ 51th	10	11,5	11,5	18,4
Valid 31-40 th	28	32,2	32,2	50,6
41-50 th	43	49,4	49,4	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2015

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi paling banyak adalah responden dengan usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 43 orang atau 49,4%.

#### 4.2.3. Pendidikan Terakhir

Data responden ketiga yang dianalisis statistik deskriptif adalah pendidikan terakhir. Berdasarkan pengembalian kuesioner, maka peneliti dapat menyajikan tabel tentang hasil statistik deskriptif pendidikan terakhir responden yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Pendidikan Terakhir Responden**  
**Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
D1/D2/D3	14	16,1	16,1	16,1
D1/D2/D4	1	1,1	1,1	17,2
S1	40	46,0	46,0	63,2
Valid S2	8	9,2	9,2	72,4
SMA	21	24,1	24,1	96,6
SMK	3	3,4	3,4	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Sumber: Data primer, diolah 2015

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi paling banyak adalah responden dengan pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 40 orang atau 46%. Tingkat pendidikan S1 umumnya telah memiliki ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD dan diharapkan akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

#### 4.3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan/pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor kostruk (Ghozali, 2006). Metode *pearson correlation* menyatakan butir pertanyaan/pernyataan dikatakan valid apabila signifikansi butir pertanyaan/pernyataan (*2-tailed*) ≤ 0,05 dan atau ≤ 0,01.

Setelah semua variabel dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid, maka dilakukan uji berikutnya yaitu uji reliabilitas variabel. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kehandalan suatu

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Pengambilan kesimpulan uji reliabilitas yaitu diuji dengan *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal atau reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* > 0,60 (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 2006).

**4.4. Hasil Pengujian Hipotesis**

**4.4.1. Hasil Uji Linear Sederhana Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H1) yaitu pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Persamaan regresinya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 TE + e$$

$\alpha$  adalah konstanta,  $\beta_1$  menunjukkan koefisien regresi, TE adalah Tekanan Eksternal dan Y adalah Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hasil pengujian dengan regresi linear sederhana adalah:

**Tabel 4.14**

**Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,016	,546		3,693	,000
TE	,414	,160	,271	2,580	,012

Sumber: Data primer, diolah 2015

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,016 + 0,414 TE + e$$

Koefisien regresi +0,414 menunjukkan bahwa Tekanan Eksternal (TE) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

**4.4.2. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji R<sup>2</sup> dilakukan dengan program *SPSS IBM 20* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.15**

**Hasil Regresi Tekanan Eksternal dan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,271 <sup>a</sup>	,073	,062	,63974

Sumber: Data primer, diolah 2014

Berdasarkan tabel di atas, nilai R<sup>2</sup> atau koefisien determinasi sebesar 0,062. Artinya bahwa variabel independen Tekanan Eksternal memberikan pengaruh sebesar 62% terhadap variabel dependen Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Sedangkan 38% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi.

**4.4.3. Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan bantuan program komputer *SPSS*. Berdasarkan tabel 4.14, signifikansi t hitung sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Nilai koefisien regresi tekanan eksternal sebesar +0,414 dengan tingkat signifikansi 0,012 menjadikan H1 penelitian ini diterima. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi tekanan eksternal adalah positif artinya bahwa semakin tinggi tekanan eksternal maka penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD semakin tinggi.



#### 4.5. Pembahasan

Menggunakan dasar teori instutusional berupa isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) yaitu adanya pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat dimana organisasi menjalankan fungsinya. Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi politik dan harapan masyarakat akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, khususnya terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi.

##### 4.5.1. Hasil Uji Linear Sederhana Akuntabilitas berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis kedua (H2) yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Persamaan regresinya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 AK + e$$

$\alpha$  adalah konstanta,  $\beta_1$  menunjukkan koefisien regresi, AK adalah Akuntabilitas dan Y adalah Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hasil pengujian dengan regresi linear sederhana adalah:

**Tabel 4.16**

**Pengaruh Akuntabilitas terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,390	,322		1,209	,230
AK	,856	,090	,719	9,494	,000

Sumber: Data primer, diolah 2015

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,390 + 0,856 AK + e$$

Koefisien regresi +0,856 menunjukkan bahwa Akuntabilitas (AK) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

##### 4.5.2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji  $R^2$  dilakukan dengan program SPSS IBM 20 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.17**

**Hasil Regresi Akuntabilitas dan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,719 <sup>a</sup>	,518	,512	,46160

Sumber: Data primer, diolah 2015

Berdasarkan tabel di atas, nilai  $R^2$  atau koefisien determinasi sebesar 0,512. Artinya bahwa variabel independen Akuntabilitas memberikan pengaruh sebesar 51% terhadap variabel dependen Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Sedangkan 49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi.

##### 4.5.3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS. Berdasarkan tabel 4.16, signifikansi t hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar +0,856 dengan tingkat signifikansi 0,000 menjadikan H2 penelitian ini diterima. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi akuntabilitas adalah positif artinya bahwa semakin akuntabel maka penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD semakin tinggi.

#### 4.6. Pembahasan

Akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja sebagai faktor yang berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik berimplikasi pada transparansi pelaporan keuangan.

##### 4.6.1. Hasil Uji Linear Sederhana Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis ketiga (H3) yaitu pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Persamaan regresinya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 PM + e$$

$\alpha$  adalah konstanta,  $\beta_1$  menunjukkan koefisien regresi, PM adalah Partisipasi Masyarakat dan Y adalah Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hasil pengujian dengan regresi linear sederhana adalah:

**Tabel 4.18**

##### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1,037	,240		4,321	,000
PM	,714	,071	,741	10,109	,000

*Sumber: Data primer, diolah 2015*

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,037 + 0,714 PM + e$$

Koefisien regresi +0,714 menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

##### 4.6.2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji  $R^2$  dilakukan dengan program *SPSS IBM 20* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.19**

##### **Hasil Regresi Partisipasi Masyarakat dan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,741 <sup>a</sup>	,549	,543	,44641

*Sumber: Data primer, diolah 2015*

Berdasarkan tabel di atas, nilai  $R^2$  atau koefisien determinasi sebesar 0,543 Artinya bahwa variabel independen Partisipasi Masyarakat memberikan pengaruh sebesar 54% terhadap variabel dependen Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Sedangkan 46% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi.

##### 4.6.3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan bantuan program komputer *SPSS*. Berdasarkan tabel 4.18, signifikansi t hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar +0,714 dengan tingkat signifikansi 0,000 menjadikan H3 penelitian ini diterima. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi partisipasi masyarakat adalah positif artinya

bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD semakin tinggi.

#### 4.7. Pembahasan

Partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting dalam meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun. Partisipasi dalam penyusunan anggaran meningkatkan kinerja, sikap dan kepuasan kerja terhadap anggaran SKPD. Partisipasi masyarakat mendorong SKPD untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang transparan terkait dengan program dan realisasi anggaran dan *outcome* dari kegiatan. Konsekuensi dari teori keagenan masyarakat dan SKPD menuntut organisasi sektor publik untuk dapat menerapkan pelaporan keuangan yang transparan.

##### 4.7.1. Hasil Uji Linear Sederhana Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis keempat (H4) yaitu pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Persamaan regresinya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 KM + e$$

$\alpha$  adalah konstanta,  $\beta_1$  menunjukkan koefisien regresi, KM adalah Komitmen Manajemen dan Y adalah Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hasil pengujian dengan regresi linear sederhana adalah:

**Tabel 4.20**

<b>Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan</b>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,781	,414		4,302	,000
	KM	,458	,115	,400	3,995	,000

Sumber: Data primer, diolah 2015

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,781 + 0,458 KM + e$$

Koefisien regresi +0,458 menunjukkan bahwa Komitmen Manajemen memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

##### 4.7.2. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji R<sup>2</sup> dilakukan dengan program SPSS IBM 20 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.21**

**Hasil Regresi Komitmen Manajemen dan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,400 <sup>a</sup>	,160	,150	,60925

Sumber: Data primer, diolah 2015

Berdasarkan tabel di atas, nilai R<sup>2</sup> atau koefisien determinasi sebesar 0,150 Artinya bahwa variabel independen Komitmen Manajemen memberikan pengaruh sebesar 15% terhadap variabel dependen Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Sedangkan 85% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi.

##### 4.7.3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS. Berdasarkan tabel 4.20, signifikansi t hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan Komitmen Manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar +0,458 dengan tingkat signifikansi 0,000 menjadikan H4 penelitian ini diterima. Pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi komitmen manajemen adalah positif artinya

bahwa semakin tinggi komitmen manajemen maka penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD semakin tinggi.

#### 4.8. Pembahasan

Berdasarkan teori institusional perlu adanya profesionalisme bagi organisasi sektor publik dan anggota organisasi sektor publik. Institusionalisasi sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam organisasi. Transparansi merupakan salah satu nilai atau prinsip yang harus dipegang oleh organisasi dalam pengelolaan keuangannya sehingga perlu adanya komitmen manajemen yang kuat tentang transparansi pelaporan keuangan. Komitmen manajemen yang tinggi akan meningkatkan komitmen transparansi pelaporan keuangan sektor publik khususnya SKPD yang merupakan organisasi yang menjalankan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan organisasi.

#### 4.9. Pembahasan Keseluruhan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan dan memberikan suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Transparansi dalam praktiknya juga membutuhkan kepercayaan. Organisasi yang mengedepankan adanya transparansi publik akan menjadi rentan akan kritik dari para pemangku kepentingan, karena para pemangku kepentingan dapat melihat potret mengenai gambaran organisasi secara terbuka. Organisasi publik akan menghadapi risiko transparansi, dimana organisasi tidak dapat memastikan apa yang menjadi harapan pemangku kepentingan dan bagaimana pemangku kepentingan akan menggunakan informasi yang disampaikan oleh organisasi publik.

### 5. SIMPULAN

- a) Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu anggota organisasi SKPD Kota Magelang. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 87 atau 96% dari jumlah kuesioner yang dikirim..
- b) Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD dipengaruhi beberapa faktor yang mendasarkan pada teori institusional. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan menurut hasil penelitian ini adalah tekanan eksternal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan komitmen manajemen.
- c) Hipotesis penelitian H1, H2, H3, H4 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Organisasi yang mengedepankan adanya transparansi publik akan menjadi rentan akan kritik dari para pemangku kepentingan, karena para pemangku kepentingan dapat melihat potret mengenai gambaran organisasi secara terbuka.

### 6. REFERENSI

- [1] Ashworth, R., G. Boyne., dan R. Delbridge. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- [2] Dacin, M. T., J. Goodstein., dan W. R. Scott. 2002. Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *The Academy of Management Journal*.
- [3] DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*.
- [4] Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz. 2004. Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- [5] Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [6] Hartono, Jogyanto. 2013. *Metodologi penelitian bisnis (salah kaprah dan pengalaman-pengalaman)*. Edisi 6. Yogyakarta: BPFE

- [7] Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Business Ethics Quarterly*.
- [8] Hood, C. 2007. What happens when transparency meets blame-avoidance?. *Public Management Review*.
- [9] Jun, K. N. dan C. Weare. 2010. Institutional Motivations in the Adoption of Innovations: The Case of E-Government. *Journal of Public Administration Research & Theory*.
- [10] Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- [11] Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology*.
- [12] Paine, L. S. 1994. Managing Organizational Integrity. *Harvard Business Review*.
- [13] Rawlins, B. L. 2008. Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust. *Public Relations Journal*.
- [14] Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- [15] Scott, W. R. 1987. The Adolescence of Institutional Theory. *Administrative Science Quarterly*.
- [16] Silver, D. 2005. Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist*.
- [17] Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- [18] Villadsen, A. R. 2011. Structural Embeddedness of Political Top Executives as Explanation of Policy Isomorphism. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- [19] Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.